# BUPATI BANJARNEGARA

## PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya perubahan kewenangan pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Daerah, perlu menambah Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ke jenis retribusi jasa umum;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/217 tentang Pedoman Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, perlu mengubah tata cara perhitungan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
c. bahwa dengan adanya obyek kekayaan daerah baru, maka perlu menambah obyek pemakaian retribusi kekayaan daerah ke jenis retribusi jasa usaha;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 142) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 258);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 142) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 258), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
(2) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :
    a. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
    b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
    c. Dihapus;
    d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
    e. Retribusi Pelayanan Pasar;
    f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
    g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
    h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
    i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
    j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
    k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

2. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di atas air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan stuktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. BAB III ditambahkan 1 (satu) bagian baru yaitu Bagian Kedua Belas yang terdiri dari 5 (lima) Pasal yaitu Pasal 55 A, Pasal 55 B, Pasal 55 C, Pasal 55 D dan Pasal 55 E, sehingga keseluruhan Bagian Kedua Belas berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Belas
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1
Nama dan Obyek Retribusi

Pasal 55 A

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas Pelayanan Tera/Tera Ulang, pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55 B

Obyek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf k adalah pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 55 C

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang diberikan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Tarif Retribusi

Pasal 55 D

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan dan jenis ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 55 E

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 D tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi Lampiran I bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Lampiran VI dihapus.

7. Ketentuan Lampiran IX diubah, sehingga menjadi Lampiran IV bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 22-6-2020

BUPATI BANJARNEGARA,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 3-7-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

INDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : (3-75/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

e. bahwa dengan adanya perubahan kewenangan pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Daerah, perlu menambah Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ke jenis retribusi jasa umum;
f. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/217 tentang Pedoman Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, perlu mengubah tata cara perhitungan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
g. bahwa dengan adanya obyek kekayaan daerah baru, maka perlu menambah obyek pemakaian retribusi kekayaan daerah ke jenis retribusi jasa usaha;

Dengan adanya perubahan kewenangan pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Daerah, yang berakibat adanya biaya pelaksanaan tera/tera ulang, maka perlu menambah Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ke jenis retribusi jasa umum.

Selain itu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/217 tentang Pedoman Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, tata cara perhitungan retribusi pengujian kendaraan bermotor perlu disesuaikan.

Adapun berkaitan dengan adanya obyek kekayaan daerah baru perlu dimasukan ke dalam retribusi kekayaan daerah sedangkan untuk menyesuaikan perkembangan pelayanan persampahan yang semakin meluas, perlu ditambahkan jenis retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Dengan dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga sebagai upaya untuk mengakomodir hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 289

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

| NO. | JENIS PELAYANAN | TARIF (Rp) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 17 | Event Organizer | | |
| | a. besar | 250.000 | Per event per hari |
| | b. sedang | 150.000 | Per event per hari |
| | c. kecil | 100.000 | Per event per hari |
| 18 | Mini Market | 25.000 | Per bulan |
| 19 | Supermarket | 100.000 | Per bulan |
| 20 | Pedagang Kaki Lima | 15.000 | Per bulan |
| 21 | Pedagang Event Insidental | 2.000 | Per event per hari |

BUPATI BANJARNEGARA,

BUDHI SARWONO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

| NO | JENIS PEMERIKASAAN KENDARAAN DAN PENILAIAN TEKNIS KENDARAAN | TARIF (Rp) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Uji Berkala Pertama | 235.000,- | |
| 2. | Uji Berkala | 60.000,- | |
| 3. | Mutasi Masuk | 135.000,- | |
| 4. | Penerbitan Tanda Bukti Lulus Uji | | |
| | • Kartu Pintar/Smart Card | 5.000,- | |
| | • Kertas Berpengaman | 5.000,- | |
| | • Stiker | 5.000,- | |
| 5. | Numpang Uji Masuk | 60.000,- | |
| 6. | Penomoran Ulang Nomor Uji | 50.000,- | |

BUPATI BANJARNEGARA,

BUDHI SARWONO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

## RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

| NO | JENIS | SATUAN | TARIF | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TERA | | TERA ULANG | |
| | | | KANTOR | TEMPAT PAKAI | KANTOR/ LUAR KANTOR | TEMPAT PAKAI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | UKURAN PANJANG | | | | | |
| | a. Kapasitas sampai dengan 1 m | buah | 3,000 | 13,000 | 4,000 | 14,000 |
| | b. Lebih dari 1 m sampai dengan 2 m | buah | 15,000 | 25,000 | 20,000 | 25,000 |
| | c. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m | buah | 20,000 | 30,000 | 25,000 | 30,000 |
| | d. Lebih dari 10 m sampai dengan 20 m | buah | 30,000 | 40,000 | 30,000 | 35,000 |
| | e. Lebih dari 20 m sampai dengan 30 m | buah | 35,000 | 45,000 | 35,000 | 40,000 |
| | f. Lebih dari 30 m sampai dengan 40 m | buah | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 45,000 |
| | g. Lebih dari 40 m sampai dengan 50 m | buah | 45,000 | 55,000 | 45,000 | 50,000 |
| | h. Lebih dari 50 m | buah | 50,000 | 60,000 | 50,000 | 55,000 |
| 2. | ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) | | | | | |
| | a. Mekanik | buah | 150,000 | 400,000 | 150,000 | 400,000 |
| | b. Elektronik | buah | 200,000 | 500,000 | 200,000 | 500,000 |
| 3. | TAKARAN (BASAH/ KERING) | | | | | |
| | a. Kapasitas sampai dengan 2 L | buah | 500 | 11,500 | 500 | 11,500 |
| | b. Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L | buah | 1,000 | 12,000 | 1,000 | 12,000 |
| | c. Lebih dari 25 L | buah | 5,000 | 16,000 | 5,000 | 16,000 |
| 4. | TANGKI UKUR TETAP | | | | | |
| | a. Kapasitas sampai dengan 500 kL | buah | - | 200,000 | - | 225,000 |
| | b. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL | buah | - | 300,000 | - | 375,000 |
| | c. Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL | buah | - | 450,000 | - | 575,000 |
| | d. Lebih dari 2.000 kL sampai dengan 5.000 kL | buah | - | 600,000 | - | 675,000 |
| | e. Lebih dari 5.000 kL sampai dengan 10.000 kL | buah | - | 750,000 | - | 825,000 |
| | f. Lebih dari 10.000 kL sampai dengan 50.000 kL | buah | - | 1,500,000 | - | 1,500,000 |
| | g. Lebih dari 50.000 kL sampai dengan 100.000 kL | buah | - | 3,000,000 | - | 3,000,000 |
| | h. Lebih dari 100.000 kL | buah | - | 5,000,000 | - | 5,000,000 |
| | Tangki Ukuran Silinder Datar yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur | | | | | |
| | 1. TANGKI UKUR GERAK | | | | | |
| | a. Kapasitas sampai dengan 5 kL | buah | 110,000 | 120,000 | 110,000 | 120,000 |
| | b. Lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL | buah | 170,000 | 180,000 | 170,000 | 180,000 |
| | c. Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL | buah | 250,000 | 260,000 | 250,000 | 260,000 |
| | d. Lebih dari 15 kL | buah | 300,000 | 310,000 | 300,000 | 310,000 |
| | Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur | | | | | |
| | 2. METER TAKSI | buah | 60,000 | 70,000 | 60,000 | 70,000 |
| | 3. METER PARKIR | buah | 60,000 | 70,000 | 60,000 | 70,000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4. ALAT UKUR CAIRAN MINYAK (Meter Bahan Bakar Minyak) | | | | | |
| | a. Meter Induk (Untuk Setiap Media Uji) | | | | | |
| | 1) Kapasitas sampai dengan 25 $m^3/h$ | buah | - | 175,000 | - | 175,000 |
| | 2) Lebih dari 25 $m^3/h$ sampai dengan 100 $m^3/h$ | buah | - | 575,000 | - | 575,000 |
| | 3) Lebih dari 100 $m^3/h$ sampai dengan 500 $m^3/h$ | buah | - | 1,950,000 | - | 1,950,000 |
| | 4) Lebih dari 500 $m^3/h$ | buah | - | 2,600,000 | - | 2,600,000 |
| | b. Meter Kerja (Untuk Setiap Media Uji) | | | | | |
| | 1) Kapasitas sampai dengan 25 $m^3/h$ | buah | 100,000 | 125,000 | 100,000 | 125,000 |
| | 2) Lebih dari 25 $m^3/h$ sampai dengan 100 $m^3/h$ | buah | 350,000 | 400,000 | 350,000 | 400,000 |
| | 3) Lebih dari 100 $m^3/h$ sampai dengan 500 $m^3/h$ | buah | 1,250,000 | 1,350,000 | 1,250,000 | 1,350,000 |
| | 4) Lebih dari 500 $m^3/h$ | buah | 1,750,000 | 1,850,000 | 1,750,000 | 1,850,000 |
| | c. Pompa Ukur BBM (Untuk setiap Pesawat) | buah | - | 150,000 | - | 150,000 |
| 5. | ALAT UKUR GAS | | | | | |
| | a. Meter Induk | | | | | |
| | 1) Kapasitas sampai dengan 100 $m^3/h$ | buah | - | 250,000 | - | 250,000 |
| | 2) Lebih dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h | buah | - | 450,000 | - | 450,000 |
| | 3) Lebih dari 500 m3/h sampai dengan 1000 m3/h | buah | - | 600,000 | - | 600,000 |
| | 4) Lebih dari 1000 m3/h sampai dengan 2000 m3/h | buah | - | 750,000 | - | 750,000 |
| | 5) Lebih dari 2000 m3/h | buah | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 |
| | b. Meter Kerja | | | | | |
| | 1) Kapasitas sampai dengan 50 $m^3/h$ | buah | - | 150,000 | - | 150,000 |
| | 2) Lebih dari 50 m3/h sampai dengan 500 m3/h | buah | - | 250,000 | - | 250,000 |
| | 3) Lebih dari 500 m3/h sampai dengan 1000 m3/h | buah | - | 350,000 | - | 350,000 |
| | 4) Lebih dari 1000 m3/h sampai dengan 2000 m3/h | buah | - | 450,000 | - | 450,000 |
| | 5) Lebih dari 2000 m3/h | buah | - | 750,000 | - | 750,000 |
| | c. Meter gas office dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur) | buah | - | 300,000 | - | 300,000 |
| | d. Perlengkpan meter gas office (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan | buah | - | 75,000 | - | 75,000 |
| | e. Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG) dan elpiji untuk setiap badan ukur | buah | - | 150,000 | - | 150,000 |
| 6. | METER AIR | | | | | |
| | a. Meter Induk | | | | | |
| | 1) Kapasitas sampai dengan 15$m^3/h$ | buah | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 175,000 |
| | 2) Lebih dari 15m3/h sampai dengn 100 m3/h | buah | 150,000 | 170,000 | 250,000 | 275,000 |
| | 3) Lebih dari 100 m3/h | buah | 200,000 | 220,000 | 300,000 | 325,000 |
| | b. Meter Kerja | | | | | |
| | 1) Kapasitas sampai dengan 10 $m^3/h$ | buah | 2,500 | 4,000 | 5,000 | 7,500 |
| | 2) Lebih dari 10 $m^3/h$ sampai dengan 100 $m^3/h$ | buah | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 17,500 |
| | 3) Lebih dari 100 $m^3/h$ | buah | 25,000 | 27,500 | 50,000 | 55,000 |
| 7. | METER LISTRIK (Meter kWh) | | | | | |
| | a. Kelas 0,2 atau kurang | | | | | |
| | 1) 3 (tiga) phasa | buah | 60,000 | 70,000 | 60,000 | 70,000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2) 1(satu) phasa | buah | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 |
| | b. Kelas 0,5 atau 1 | | | | | |
| | 1) 3(tiga) phasa | buah | 7,500 | 8,500 | 7,500 | 8,500 |
| | 2) 1(satu) phasa | buah | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 |
| | c. Kelas 2 | | | | | |
| | 1) 3(tiga) phasa | buah | 4,500 | 5,500 | 4,500 | 5,500 |
| | 2) 1(satu) phasa | buah | 1,500 | 2,500 | 1,500 | 2,500 |
| 8. | ANAK TIMBANGAN | | | | | |
| | a. Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3) | | | | | |
| | 1) sampai dengan 1 kg | buah | 300 | 300 | 500 | 1,500 |
| | 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg | buah | 500 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| | 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg | buah | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 3,500 |
| | b. Ketelitian khusus (kelas M1) | | | | | |
| | 1) sampai dengan 1 kg | buah | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
| | 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg | buah | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 3,500 |
| | 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg | buah | 7,500 | 7,500 | 10,000 | 11,000 |
| 9. | TIMBANGAN | | | | | |
| | a. Neraca | buah | 11,000 | 31,000 | 20,000 | 40,000 |
| | b. Dacin | | | | | |
| | 1) Kapasitas sampai dengan 25 kg | buah | 1,500 | 21,500 | 12,500 | 25,000 |
| | 2) Lebih dari 25 kg | buah | 25,000 | 22,500 | 15,000 | 35,000 |
| | c. Sentisimal | | | | | |
| | 1) Kapasitas sampai dengan 150 kg | buah | 7,500 | 27,500 | 20,000 | 40,000 |
| | 2) Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg | buah | 8,000 | 28,000 | 22,500 | 42,500 |
| | 3) Lebih besar dari 500 kg | buah | 15,000 | 40,000 | 40,000 | 75,000 |
| | d. Desimal/ Milisimal | buah | 8,000 | 28,000 | 22,500 | 42,500 |
| | e. Bobot Ingsut | | | | | |
| | 1) Kapasitas sampai dengan 25 kg | buah | 6,500 | 26,500 | 17,500 | 37,500 |
| | 2) Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg | buah | 7,500 | 27,500 | 20,000 | 40,000 |
| | 3) Lebih besar dari 150 kg | buah | 11,500 | 31,500 | 25,000 | 60,000 |
| | f. Meja Beranger | buah | 1,500 | 21,500 | 12,500 | 25,000 |
| | g. Pegas | | | | | |
| | 1) Kapasitas sampai dengan 25 kg | buah | 6,500 | 26,500 | 12,500 | 32,500 |
| | 2) Lebih besar dari 25 kg | buah | 10,000 | 30,000 | 22,500 | 32,500 |
| | h. Cepat | | | | | |
| | 1) Kapasitas sampai dengan 500 kg | buah | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 60,000 |
| | 2) Lebih besar dari 500 kg | buah | 25,000 | 45,000 | 50,000 | 70,000 |
| | i. Timbangan kwadaran/ Surat | buah | 3,000 | 7,500 | 10,000 | 15,000 |
| | j. Elektronik (Kelas III dan IIII) | | | | | |
| | 1. Kapasitas sampai dengan 25 kg | buah | 27,500 | 47,500 | 27,500 | 47,500 |
| | 2. Lebih besar dari 25 kg sampai dengn 150 kg | buah | 30,000 | 50,000 | 30,000 | 50,000 |
| | 3. Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg | buah | 35,000 | 55,000 | 35,000 | 55,000 |
| | 4. Lebih besar dari 500 kg sampai dengan 1000 kg | buah | 50,000 | 70,000 | 50,000 | 70,000 |
| | 5. Lebih besar dari 1000 kg | buah | 130,000 | 150,000 | 130,000 | 150,000 |
| | k. Elektronik (Kelas II) | | | | | |
| | 1. Kapasitas sampai dengan 1 kg | buah | 50,000 | 60,000 | 50,000 | 60,000 |
| | 2. Lebih besar dari 1 kg | buah | 60,000 | 70,000 | 60,000 | 70,000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | l. Timbangan Jembatan | | | | | |
| | 1. Kapasitas sampai dengan 50 ton | buah | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 |
| | 2. Lebih besar dari 50 ton | buah | - | 2,000,000 | - | 2,000,000 |
| | m. Timbangan Otomatis | | | | | |
| | 1. Kapasitas sampai dengan 100 ton/h | buah | - | 400,000 | - | 400,000 |
| | 2. Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h | buah | - | 550,000 | - | 550,000 |
| | 3. Lebih besar dari 500 ton/h | buah | - | 650,000 | - | 650,000 |
| 10. | METER KADAR AIR | | | | | |
| | a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi | buah | 35,000 | 45,000 | 35,000 | 45,000 |
| | b. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi | buah | 70,000 | 80,000 | 70,000 | 80,000 |
| | c. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi | buah | 60,000 | 70,000 | 60,000 | 70,000 |

BUPATI BANJARNEGARA,

BUDHI SARWONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

| NO. | JENIS KEKAYAAN DAERAH | TARIF | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 3. | Alat-Alat Berat/Kendaraan Berat : | | |
| | a. Mesin gilas/pemadat : | | |
| | • Tandem roller 2 Ton | Rp 150.000,- | /hari |
| | • Tandem roller 4 Ton | Rp 200.000,- | /hari |
| | d. Exavator PC 200 | Rp 125.000,- | /jam |
| | da.Exavator PC 45 | Rp 600.000,- | /hari |
| | o. Truck Los Bak 6 Ton | Rp 200.000,- | /angkut |
| 4. | Alat dan Mesin Pertanian | | |
| | a. Peralatan Inseminasi Buatan | Rp 40.000,- | /ekor |
| | b. Peralatan Kesehatan Hewan | | |
| | 1) Peralatan Pemeriksaan Klinis | | |
| | a) Unggas Komersial | Rp 25.000,- | /ekor |
| | b) Unggas Hias/Aduan | Rp 5.000,- | /ekor |
| | c) Ternak Besar | Rp 2.500,- | /ekor |
| | d) Ternak Kecil | Rp 1.000,- | /ekor |
| | e) Aneka Ternak | Rp 5.000,- | /ekor |
| | 2) Peralatan Bedah Hewan | Rp 5.000,- | /ekor |
| | 3) Peralatan Reproduksi dan Kebidanan Hewan | | |
| | a) Ternak Besar | Rp 30.000,- | /ekor |
| | b) Ternak Kecil | Rp 75.000,- | /ekor |
| | 4) Peralatan Rehabilitasi Hewan | Rp 50.000,- | /ekor |
| | 5) Peralatan Laboratorium Kesehatan Hewan | Rp 10.000,- | /sampel |
| 9. | Los/Kios Kuliner | Rp 250.000,- | /bulan |

BUPATI BANJARNEGARA,

BUDHI SARWONO